



Katalog BPS : 9206.33

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL JAWA TENGAH 1996 - 1998



BPS

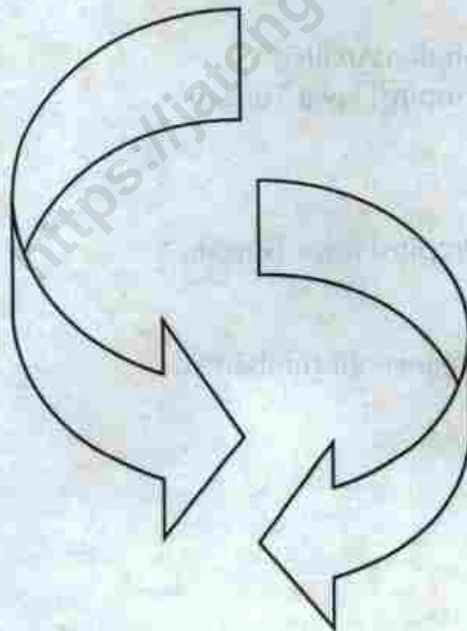
BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI JAWA TENGAH



91/5/00.

Katalog BPS : 9206.33

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL JAWA TENGAH 1996 - 1998



BPS BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI JAWA TENGAH

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL JAWA TENGAH 1996 - 1998

No. Publikasi : 33561.001
Katalog BPS : 9206.33
Ukuran Buku : Kwarto
Jumlah Halaman : 34

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Produksi
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Tinjauan Ekonomi Regional Jawa Tengah 1996 - 1998 yang memuat tinjauan perkembangan ekonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

Dalam publikasi ini disajikan analisis ekonomi antar daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah mencakup perbandingan PDRB antar daerah, peranan sektoral terhadap PDRB, serta peringkat setiap daerah kabupaten/kota.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Kritik dan saran-saran dari para pemakai sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa datang.

Semarang, Maret 2000
Badan Pusat Statistik
Propinsi Jawa Tengah

Kepala,



MAHMUDI, MSc

NIP : 340002464

DAFTAR ISI

	Halaman
I.1. Umum	1
I.2. Kerangka Penyajian	1
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antar Daerah	2
2.2. Struktur Ekonomi	9
2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	21
2.4. PDRB Per kapita	23
2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita Propinsi Jawa Tengah	28

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL JAWA TENGAH TAHUN 1996-1998

I.1. U M U M

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah hasil penjumlahan nilai tambah Bruto, yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan dalam batas-batas suatu wilayah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

PDRB kabupaten/kota sejauh ini banyak digunakan baik untuk perencanaan, evaluasi, maupun analisa lebih lanjut. Agar gambaran perekonomian secara makro dalam suatu wilayah dapat terlihat keterbandingannya dari waktu ke waktu, maka PDRB disajikan berdasarkan :

- a. Atas dasar harga berlaku yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan.
- b. Atas dasar harga tetap (konstan) yaitu apabila semua produksi barang dan jasa dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar.

I.2. Kerangka Penyajian

Dalam publikasi ini akan dibahas gambaran umum perekonomian Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 1996-1998. Kondisi ekonomi di masing-masing Daerah kabupaten/kota secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi makro yaitu antara lain nilai tambah yang dihasilkan,

struktur perekonomian, laju pertumbuhan, dan PDRB per kapita. Karena tidak semua Daerah kabupaten/kota mempunyai sumber daya alam dari minyak dan gas bumi (Migas) maka uraiannya akan selalu dipisahkan menjadi PDRB dengan Migas dan Tanpa Migas. Ada 2 Daerah kabupaten/kota penghasil migas yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Blora.

Data PDRB Kabupaten dan Kota yang disajikan bertujuan untuk memudahkan melakukan analisa perbandingan antar daerah. Perbedaan pola perkembangan suatu daerah dengan daerah lainnya, antara lain disebabkan oleh perbedaan sumber-sumber alam dan faktor produksi yang tersedia. Masalah tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada analisa antar region/Daerah kabupaten/kota.

Pada bagian akhir publikasi ini, akan dibahas perbandingan kombinasi laju pertumbuhan PDRB per Daerah kabupaten/kota terhadap laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah, dan PDRB per kapita Daerah kabupaten/kota terhadap PDRB per kapita Propinsi Jawa Tengah.

Melalui analisa empat kuadran akan diketahui tingkat II yang mengalami pertumbuhan nyata PDRB dan PDRB per kapita lebih tinggi dari angka PDRB Propinsi Jawa Tengah.

II. ANALISA ANTAR REGION

Perekonomian pada tingkat propinsi identik dengan kumulatif aktivitas / kegiatan ekonomi pada level kabupaten / kota. PDRB kabupaten / kota memberikan gambaran perekonomian kabupaten / kota secara makro. Meskipun demikian PDRB antar kabupaten/ kota dapat dibandingkan guna mengetahui peranannya, sektor yang dominan, pertumbuhan dan sebagainya.

Dengan disajikannya data PDRB menurut sektor secara berkala dapat dilihat posisi dan kondisi perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu. Analisa ini akan membahas gambaran perekonomian keadaan tahun 1998 dan perkembangannya selama periode tahun 1996 - 1998.

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antar Daerah

2.1.1. PDRB Antar Kabupaten/Kota

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu region. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sangat tergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah

tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Untuk kepentingan berbagai analisa ekonomi makro masing-masing kabupaten/kota pada umumnya digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk peringkatnya dapat dilihat dari kontribusi masing-masing kabupaten/kota yang berada dalam wilayah propinsi tersebut.

Dari Tabel A.1 dan A.2 dapat dilihat peranan setiap sektor ekonomi di Kab./Kota terhadap total sektor tersebut di Jawa Tengah tahun 1998 dan Tabel A.2 menunjukkan peranan sektor di Kab./Kota terhadap PDRB Kab./Kota di Jawa Tengah tahun 1998. Sumbangan terbesar untuk sektor pertanian tahun 1998 berasal dari Kab. Cilacap, yang didominasi oleh sub sektor perikanan dan tabama, tetapi bila dilihat peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kab. Cilacap sendiri, maka peranan sektor tersebut menjadi kecil akibat pengaruh peranan minyak yang besar. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian penyumbang terbesar adalah Kab. Blora sebesar 12,81 persen. Hal ini karena pertambangan minyak hanya terdapat di Kab. Blora. Bila dilihat peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kab. Blora, maka sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di Kab. Blora. Sumbangan terbesar untuk sektor industri pengolahan berasal dari Kab.

Cilacap yaitu sebesar 21,80 persen. Hal ini karena adanya kegiatan pengilangan minyak nasional yang berlokasi di Kab. Cilacap. Bila terhadap PDRB Kab. Cilacap sendiri, sektor industri pengolahan juga merupakan sektor yang dominan dalam menentukan perekonomian di Kab. Cilacap. Sedang sumbangan terbesar untuk sektor listrik dan air, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan dan Jasa-jasa

berasal dari Kota Semarang. Hal ini disebabkan selain Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, juga sebagai pusat perekonomian. Sehingga kegiatan ekonomi sebagian besar masih terkonsentrasi di kota Semarang. Bila terhadap total PDRB Kota Semarang sendiri, maka sektor yang dominan adalah sektor Perdagangan yang memberikan sumbangan sebesar 40,67 persen.

Tabel A.1. Peranan Sektor di Kab./Kota terhadap total Sektor di Jawa Tengah tahun 1998

Kabupaten/Kota	Pertanian	Penggalian	Industri	Listrik,air	Bangunan	Perdagangan	Angkutan	Keuangan	Jasa
Kabupaten									
Cilacap	9,39	11,48	21,80	6,23	4,08	19,11	5,30	5,84	4,23
Banyumas	3,10	3,60	2,09	2,93	2,43	1,69	4,49	4,86	3,81
Purbalingga	2,37	0,51	0,52	0,95	2,54	1,18	1,77	1,31	3,11
Banjarnegara	4,09	1,02	1,07	0,74	3,58	1,14	1,84	1,56	2,54
Kebumen	3,89	11,77	0,76	1,76	1,09	1,53	1,98	2,23	3,39
Purworejo	2,95	4,23	0,57	1,67	2,54	1,39	1,63	1,50	3,56
Wonosobo	2,57	0,98	0,29	1,71	2,04	0,68	1,44	0,86	0,85
Magelang	3,47	5,72	1,62	1,28	3,28	1,49	3,21	1,83	3,09
Boyolali	3,78	1,66	1,48	1,59	1,34	2,76	1,77	3,09	1,80
Klaten	3,27	1,29	2,12	2,22	6,25	3,07	1,95	2,84	3,93
Sukoharjo	2,69	3,29	2,52	3,23	3,29	2,12	2,82	2,16	3,01
Wonogiri	4,51	1,97	0,34	1,47	1,89	0,72	4,76	1,74	2,00
Karanganyar	2,19	2,95	4,04	4,34	1,43	1,75	1,48	1,98	3,53
Sragen	3,48	3,83	1,02	2,21	2,89	1,13	1,77	1,66	1,95
Grobogan	3,14	2,16	0,19	1,65	3,93	1,36	1,20	1,19	2,87
Blora	3,22	12,87	0,33	0,96	1,87	1,07	1,18	2,44	1,52
Rembang	2,67	1,65	0,24	0,80	1,16	0,99	1,95	1,41	1,49
Pati	4,94	1,64	1,12	3,01	1,91	1,84	2,36	4,32	1,88
Kudus	1,30	0,27	18,08	4,11	2,33	9,37	2,98	4,06	2,45
Jepara	2,32	1,52	2,55	1,39	2,08	2,58	3,89	2,65	2,29
Demak	3,35	0,50	0,75	1,21	1,55	1,65	1,30	1,26	2,19
Semarang	2,28	0,68	3,93	3,72	1,38	2,00	1,56	2,37	2,95
Temanggung	2,51	2,06	0,92	1,97	2,94	0,59	1,98	1,76	3,50
Kendal	3,81	1,71	5,53	6,64	1,93	3,07	1,76	2,06	3,19
Batang	2,14	4,57	2,06	0,89	1,59	1,32	1,07	1,30	2,18
Pekalongan	1,92	2,67	2,30	1,38	3,25	1,90	2,43	2,34	2,79
Pemalang	3,39	2,24	1,52	1,84	2,01	2,13	1,74	2,31	2,13
Tegal	2,35	3,63	1,92	1,83	2,24	2,43	2,66	3,03	1,90
Brebes	6,41	3,58	1,03	3,10	1,99	2,90	0,93	2,76	1,50
Kota									
Magelang	0,11	0,00	0,18	2,12	2,93	0,22	2,90	1,70	2,72
Surakarta	0,23	0,18	3,25	7,33	8,74	2,39	7,38	6,07	3,41
Salatiga	0,14	0,48	0,48	2,56	0,88	0,49	1,32	1,06	1,76
Semarang	0,84	3,38	12,03	17,82	12,40	19,91	18,34	18,73	13,95
Pekalongan	0,77	0,00	0,90	1,39	2,71	1,08	2,49	2,05	1,52
Tegal	0,40	0,00	0,48	1,95	1,52	0,96	2,39	1,68	0,95
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel A.2. Peranan Sektor di Kab. Koata terhadap PDRB Kab. Kota di Jawa Tengah 1998

Kabupaten/Kota	Pertanian	Penggalian	Industri	Listrik,air	Bangunan	Perdag.	Angkutan	Keuangan	Jasa	Total
Kabupaten										
Cilacap	17,19	0,73	42,68	0,31	0,94	32,16	1,49	1,74	2,76	100,00
Banyumas	30,29	1,23	21,82	0,78	2,99	15,18	8,74	7,70	13,27	100,00
Purbalingga	39,72	0,30	9,33	0,43	5,35	18,17	4,55	3,57	18,59	100,00
Banjarnegara	49,74	0,43	13,86	0,24	5,47	12,75	3,44	3,07	11,00	100,00
Kebumen	45,35	4,79	9,45	0,56	1,60	16,40	3,54	4,21	14,10	100,00
Purworejo	41,50	2,08	8,53	0,64	4,48	17,97	3,52	3,43	17,86	100,00
Wonosobo	57,13	0,76	6,80	1,03	5,69	13,88	4,91	3,09	6,72	100,00
Magelang	38,06	2,19	19,03	0,38	4,53	15,03	5,42	3,26	12,11	100,00
Boyolali	39,46	0,60	16,49	0,45	1,76	26,48	2,84	5,23	6,69	100,00
Klaten	28,69	0,39	19,83	0,53	6,88	24,73	2,63	4,04	12,28	100,00
Sukoharjo	27,43	1,17	27,50	0,90	4,21	19,85	4,42	3,57	10,95	100,00
Wonogiri	59,22	0,90	4,81	0,52	3,11	8,73	9,62	3,70	9,39	100,00
Karanganyar	21,20	1,00	41,82	1,14	1,75	15,57	2,20	3,12	12,21	100,00
Sragen	46,93	1,81	14,76	0,81	4,90	14,09	3,67	3,65	9,38	100,00
Grobogan	47,56	1,14	3,06	0,68	7,47	18,87	2,80	2,92	15,51	100,00
Blora	50,50	7,00	5,47	0,41	3,68	15,38	2,85	6,20	8,51	100,00
Rembang	52,06	1,12	5,07	0,43	2,84	17,74	5,87	4,49	10,38	100,00
Pati	49,67	0,58	12,04	0,82	2,42	17,02	3,66	7,05	6,75	100,00
Kudus	4,11	0,03	61,07	0,35	0,92	27,22	1,45	2,08	2,76	100,00
Jepara	24,13	0,55	28,36	0,39	2,72	24,66	6,22	4,48	8,49	100,00
Demak	47,19	0,25	11,24	0,47	2,75	21,36	2,82	2,89	11,04	100,00
Semarang	22,14	0,23	40,83	0,98	1,68	17,85	2,33	3,73	10,22	100,00
Temanggung	39,44	1,13	15,44	0,84	5,81	8,46	4,79	4,48	19,62	100,00
Kendal	25,78	0,40	40,05	1,22	1,64	19,09	1,83	2,27	7,70	100,00
Batang	30,19	2,25	31,02	0,34	2,82	17,11	2,31	2,99	10,97	100,00
Pekalongan	22,86	1,11	29,20	0,45	4,85	20,72	4,44	4,53	11,85	100,00
Pemalang	38,70	0,89	18,52	0,57	2,89	22,36	3,07	4,29	8,70	100,00
Tegal	27,08	1,46	23,62	0,57	3,24	25,81	4,73	5,68	7,81	100,00
Brebes	54,47	1,06	9,40	0,72	2,13	22,64	1,22	3,82	4,56	100,00
Kota										
Magelang	4,01	0,00	7,31	2,20	14,05	7,78	17,07	10,52	37,06	100,00
Surakarta	2,19	0,06	32,99	1,89	10,41	20,81	10,76	9,34	11,54	100,00
Salatiga	6,03	0,73	22,06	3,03	4,82	19,74	8,79	7,49	27,32	100,00
Semarang	1,86	0,26	28,58	1,08	3,46	40,67	6,27	6,76	11,05	100,00
Pekalongan	17,58	0,00	22,14	0,87	7,81	22,75	8,78	7,63	12,44	100,00
Tegal	13,15	0,00	17,01	1,76	6,32	29,28	12,18	9,06	11,24	100,00
Total	25,97	0,91	27,78	0,71	3,26	23,88	4,00	4,22	9,20	100,00

Keadaan 1996 dan 1998 (sebelum dan sesudah krisis)

Dari Tabel A.3 terlihat bahwa peringkat tertinggi pada tahun 1996sebelum krisis ditempati oleh Kota Semarang. Hal ini wajar selain Kota Semarang sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah juga sebagai pusat perekonomian sehingga kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota Semarang.

Dampak resesi ekonomi tahun 1998 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kota Semarang, sehingga untuk tahun 1998 peringkat tertinggi ditempati oleh kabupaten Cilacap. Posisi Kabupaten Cilacap sebagai peringkat pertama karena dukungan produksi kilang minyak dan secara nasional merupakan komoditi strategis.

Pengaruh krisis terhadap kontribusi kabupaten/kota cukup

bervariasi, namun demikian beberapa Daerah sebelum krisis (1996) dan pada saat krisis (1998) yang masih bertahan pada peringkatnya sebanyak 13 daerah Kab/Kota yaitu Kabupaten Kudus (ke 3), Kab. Kendal (ke 4), Kab. Pemalang (ke 16), Kab. Pekalongan

(ke 19), Kab. Banjarnegara (ke 20), Kab. Wonogiri (ke 21), Kab. Blora (ke 27), Kab. Temanggung (ke 28), Kab. Purbalingga (ke 29), Kota Pekalongan (ke 32), Kota Tegal (ke 33), Kota Magelang (ke 34), dan Kota Salatiga (ke 35).

KABUPATEN/KOTA	1993	Peringkat	1996	Peringkat	1997	Peringkat	1998	Peringkat
KABUPATEN								
CILACAP	14,67	1	11,89	2	11,87	2	14,18	1
BANYUMAS	2,59	10	2,51	12	2,55	11	2,66	10
PURBALINGGA	1,48	29	1,58	29	1,61	29	1,55	29
BANJARNEGARA	2,10	20	2,02	20	2,03	20	2,14	20
KEBUMEN	2,45	14	2,45	14	2,36	5	2,23	18
PURWOREJO	1,68	28	1,70	26	1,77	26	1,85	23
WONOSOBO	1,27	31	1,31	30	1,23	31	1,17	31
MAGELANG	2,60	9	2,53	11	2,50	12	2,36	15
BOYOLALI	2,33	15	2,38	15	2,36	14	2,49	14
KLATEN	3,10	5	2,93	7	2,98	7	2,96	6
SUKOHARJO	2,46	12	2,75	10	2,83	9	2,55	12
WONOGIRI	1,92	22	1,95	21	1,90	21	1,98	21
KARANGANYAR	2,93	7	2,79	9	2,72	10	2,68	8
SRAGEN	1,73	27	1,85	25	1,79	25	1,92	22
GROBOGAN	2,13	19	1,92	22	1,81	24	1,72	26
BLORA	1,89	23	1,65	27	1,75	27	1,72	27
REMBANG	1,33	30	1,26	31	1,27	30	1,33	30
PATI	2,53	11	2,51	13	2,50	13	2,58	11
KUDUS	7,90	3	8,62	3	8,14	3	8,22	3
JEPARA	2,18	18	2,33	17	2,35	17	2,50	13
DEMAK	1,80	25	1,87	24	1,88	22	1,84	25
SEMARANG	2,21	17	2,88	8	2,85	8	2,67	9
TEMANGGUNG	1,75	26	1,64	28	1,68	28	1,65	28
KENDAL	3,92	4	3,93	4	4,12	4	3,83	4
BATANG	1,86	24	1,91	23	1,87	23	1,84	24
PEKALONGAN	2,09	21	2,10	19	2,20	19	2,18	19
PEMALANG	2,46	13	2,37	16	2,35	16	2,27	16
TEGAL	2,24	16	2,24	18	2,27	18	2,25	17
BREBES	2,93	8	3,00	6	3,13	5	3,05	5
KOTA								
MAGELANG	0,77	34	0,74	34	0,71	34	0,68	34
SURAKARTA	2,96	6	3,17	5	3,03	6	2,74	7
SALATIGA	0,57	35	0,60	35	0,58	35	0,60	35
SEMARANG	11,36	2	12,72	1	13,11	1	11,69	2
PEKALONGAN	0,97	21	1,07	32	1,06	32	1,13	32
TEGAL	0,82	33	0,83	33	0,84	33	0,79	33
JAWA TENGAH	100,00		100,00		100,00		100,00	

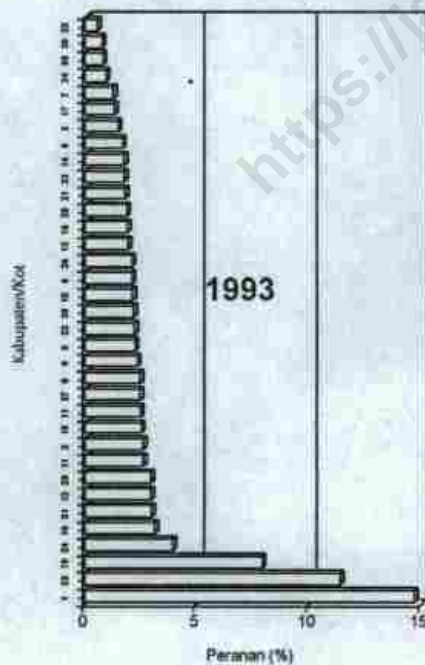
Selain peringkat bertahan, terdapat 8 Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan naik peringkat untuk data tahun 1997 ke tahun 1998, yaitu Kabupaten Cilacap (dari peringkat 2 ke 1), Kabupaten Klaten (dari peringkat 7 ke 6), kemudian disusul Kabupaten Banyumas (dari peringkat 11 ke 10), Kabupaten Pati (dari peringkat 13 ke 11), Kabupaten Jepara (dari peringkat 17 ke 13), Kabupaten Tegal (dari peringkat 18 ke 17), Kabupaten Sragen (dari peringkat 25 ke 22), dan terakhir Kabupaten Purworejo (dari peringkat 26 ke 23).

Keadaan Tahun 1993 dan 1998

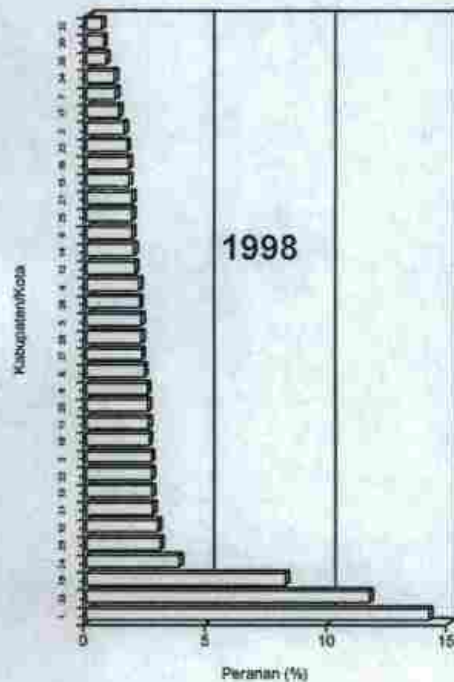
Perubahan yang terjadi selama kurun waktu enam tahun (tahun 1993-1998), mengakibatkan terjadinya pergeseran peringkat antara kabupaten/kota di Jawa Tengah, ini tergantung daripada perilaku sektor di daerah untuk mencukupi permintaan.

Dari Tabel A.3 terlihat bahwa Daerah Kabupaten/Kota yang mampu melakukan perubahan peringkat naik dalam periode tahun 1993 ke 1998 sebanyak 7 Daerah Kabupaten/Kota yang pesat peningkatannya adalah

Grafik 1 a Peringkat Peranan PDRB Kab./Kota Terhadap Total PDRB 35 Daerah Kab./Kota



Grafik 1 b Peringkat Peranan PDRB Kab./Kota Terhadap Total PDRB 35 Daerah Kab./Kota



Kabupaten Sragen (dari peringkat 27 ke 22), Kabupaten Purworejo (dari peringkat 28 ke 23), dan Kab. Semarang (dari peringkat 17 ke 9). Untuk selanjutnya kelompok peringkat tetap/bertahan ditempati oleh 17 daerah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Cilacap (ke 1), Kota Semarang (ke 2), Kabupaten Kudus (ke 3), Kabupaten Kendal (ke 4), Kabupaten Banyumas (ke 10), Kabupaten Pati (ke 11), Kabupaten Sukoharjo (ke 12), Kabupaten Banjarnegara (ke 20), Kabupaten Batang (ke 24), Kabupaten Demak (ke 25), Kabupaten Purbalingga (ke 29), Kabupaten Rembang (ke 30), Kabupaten Wonosobo (ke 31), Kota Pekalongan (ke 32), Kota Tegal (ke 33), Kota Magelang (ke 34), Kota Salatiga (ke 35).

Adapun yang mengalami peringkat turun, terdapat 10 Daerah Kabupaten/Kota dan yang cukup jauh turunnya, antara lain Kabupaten Magelang (dari peringkat 9 ke 15), Kabupaten Kebumen (dari peringkat 14 ke 18), Kabupaten Grobogan (dari peringkat 19 ke 26), dan Kabupaten Blora (dari peringkat 23 ke 27).

2.1.2. Kontribusi PDRB Menurut Wilayah Pembangunan

Terbentuknya PDRB Jawa Tengah tidak akan terlepas dari PDRB yang dibentuk diseluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Guna memenuhi keperluan perencanaan pembangunan, PDRB akan dikelompokkan menurut

wilayah yang ada di Jawa Tengah sebanyak 10 Wilayah Pembangunan yaitu:

- Wilayah Pembangunan I terdiri dari 6 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
- Wilayah Pembangunan II terdiri dari 4 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang.
- Wilayah Pembangunan III terdiri dari 3 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
- Wilayah Pembangunan IV terdiri dari 3 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.
- Wilayah Pembangunan V terdiri dari 1 Daerah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kebumen.
- Wilayah Pembangunan VI terdiri dari 1 Daerah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banjarnegara.
- Wilayah Pembangunan VII terdiri dari 5 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo.
- Wilayah Pembangunan VIII terdiri dari 7 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

- Wilayah Pembangunan IX terdiri dari 1 Daerah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Blora.
- Wilayah Pembangunan X terdiri dari 4 Daerah Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang.

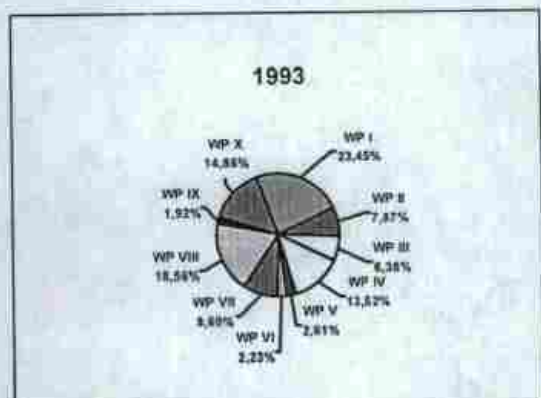
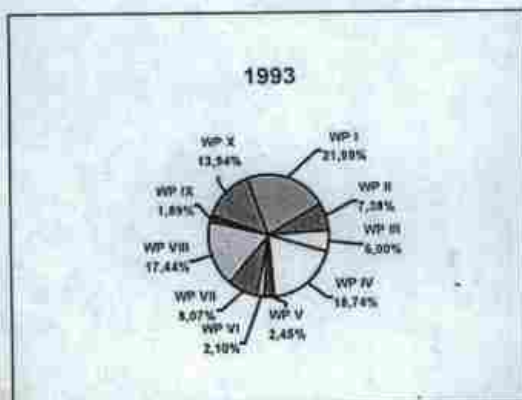
Berdasarkan pembagian Wilayah Pembangunan tersebut, sumbangan

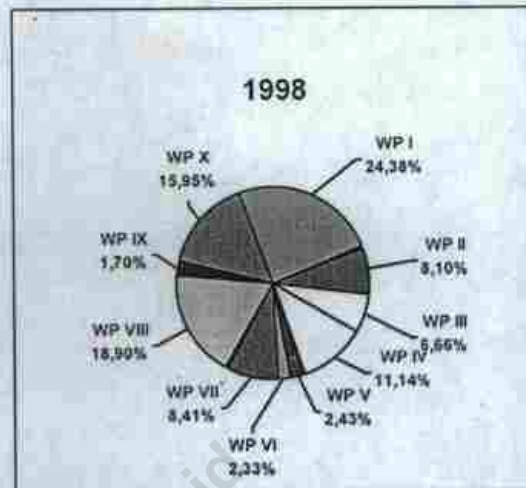
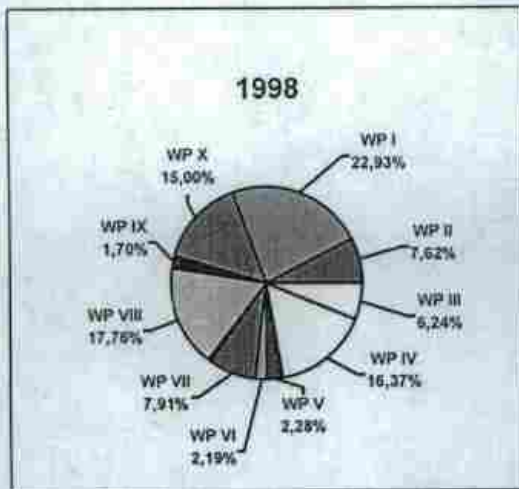
terbesar diberikan oleh Wilayah Pembangunan I yaitu sebesar 23,90 persen tahun 1996 dengan migas dan 25,66 persen tanpa migas. Sedangkan pada tahun 1998 pengaruh resesi ekonomi cukup kuat mempengaruhi Wilayah Pembangunan I, sehingga peranannya menurun dibanding tahun 1996 maupun 1997, yaitu 22,93 persen dengan migas dan tanpa migas sebesar 24,38 persen.

TABEL A.2.
PERANAN WILAYAH PEMBANGUNAN TERHADAP PDRB JAWA TENGAH
ATAS DASAR HARGA BERLAKU, TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN 1998

WILAYAH PEMBANGUNAN	1996		1997		1998	
	DENGAN MIGAS	TANPA MIGAS	DENGAN MIGAS	TANPA MIGAS	DENGAN MIGAS	TANPA MIGAS
WILBANG I	23,90	25,66	24,45	26,11	22,93	24,38
WILBANG II	7,44	7,99	7,46	8,03	7,62	8,10
WILBANG III	6,08	6,52	6,23	6,67	6,24	6,66
WILBANG IV	16,00	9,97	16,03	10,06	16,37	11,14
WILBANG V	2,45	2,63	2,36	2,53	2,28	2,43
WILBANG VI	2,02	2,16	2,01	2,17	2,19	2,33
WILBANG VII	7,91	8,48	7,84	8,47	7,91	8,41
WILBANG VIII	17,83	19,11	17,66	18,88	17,76	18,90
WILBANG IX	1,65	1,68	1,72	1,80	1,70	1,70
WILBANG X	14,72	15,8	14,24	15,28	15,00	15,95
JAWA TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kontribusi PDRB Menurut Wilayah Pembangunan
(Dengan Migas) (Tanpa Migas)





Kontributor kedua setelah Wilayah Pembangunan I adalah Wilayah Pembangunan VIII untuk PDRB dengan migas pada tahun 1996 sebesar 17,83 persen. Wilayah Pembangunan IV di urutan ketiga dengan sumbangannya sebesar 16,00 persen. Tetapi apabila pengaruh migas dikeluarkan untuk tahun 1996 urutan ketiga diduduki oleh Wilayah Pembangunan X dengan sumbangan sebesar 15,80 persen dan Wilayah Pembangunan IV menjadi urutan keempat sebesar 9,97 persen.

Pada tahun 1997 dan 1998 Wilayah Pembangunannya tidak mengalami pergeseran.

Kontribusi yang kurang menguntungkan pada tahun 1996,1997 dan 1998 ditempati oleh Wilayah Pembangunan V, VI dan Wilayah Pembangunan IX, hal tersebut disebabkan masing-masing Wilayah Pembangunan hanya terdiri satu kabupaten daerah kabupaten/kota. Peranan dari ketiga Wilayah

Pembangunan tersebut berkisar antara 1,65 sampai dengan 2,63 persen.

2.2. Struktur Ekonomi

2.2.1. Struktur Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota

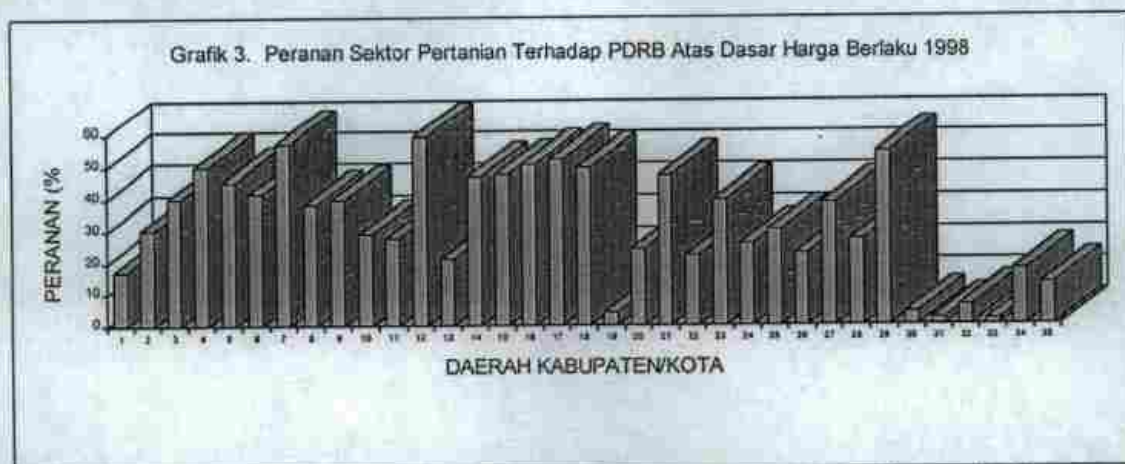
Struktur ekonomi suatu region sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor tersebut menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor. Untuk menggambarkan struktur perekonomian dimaksud berikut ini disajikan PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan kondisi perekonomian pada tahun 1993 dan 1998 Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2.2.1.a. Struktur Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 1993 dan 1998

Sampai saat ini sektor pertanian masih menduduki peranan penting di beberapa Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari tabel B, terlihat bahwa 75 persen lebih dari seluruh Daerah kabupaten / kota peranan sektor pertanian masih berada di atas

20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian sebagian besar Daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah sampai tahun 1998 masih tergantung kepada sektor pertanian. Walaupun demikian dalam kurun waktu lima tahun (1993 - 1998) terdapat beberapa kabupaten / kota menunjukkan perubahan peranan sektor pertanian, secara perlahan akan digeser oleh sektor . industri.

Peranan (Persen)	Daerah Kabupaten/kota	
	1993	1998
0 - 9.99	Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab. Kudus	Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab. Kudus
10.00 - 19.00	Kab. Cilacap, Kota Pekalongan, Kota Tegal	Kab. Cilacap, Kota Pekalongan, Kota Tegal
20.00 - 29.99	Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal	Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal, Kab. Jepara, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal
30.00 - 39.99	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Tegal	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Magelang, Kab. Batang, Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang
40.00 - 49.99	Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang	Kab. Kebumen, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo
50.00 +	Kab. Brebes	Kab. Wonosobo, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Brebes, Kab. Wonogiri



Untuk kelompok (0 - 9,99 persen) peranan sektor pertanian di

tahun 1998 masih relatif tetap sebanyak 5 Daerah kabupaten/kota,

begitu juga untuk kelompok (10,00 – 19,99 persen) terdapat 3 Daerah kabupaten/kota. Sedangkan kelompok (20,00 – 29,99 persen) untuk tahun 1998 mengalami perubahan penambahan sebanyak 3 (tiga) Daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Jepara, perubahan ini disebabkan sektor industri mengalami kenaikan cukup berarti bagi daerah yang bersangkutan. Begitu juga untuk kelompok (30,00 – 39,99 persen), mengalami penurunan dari tahun 1993 sebanyak 10 Daerah Kabupaten/Kota dan tahun 1998 sebanyak 7 Daerah kabupaten/kota.

Perubahan ini disebabkan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Jepara dan, Kabupaten Tegal pindah ke kelompok 20,00 – 29,99 persen, untuk Kabupaten Purworejo pindah ke kelompok 40,00 – 49,99 persen. Sedang Kabupaten Magelang pada tahun 1993 berada di kelompok 40,00 - 49,99 persen pindah ke kelompok 30,00 - 39,99 persen. Pada tahun 1998 untuk kelompok 50+ mengalami perubahan penambahan sebanyak 4 (empat) Daerah kabupaten/kota yaitu Wonosobo, Wonogiri, Blora, Rembang.

Satu hal yang menarik, khususnya untuk Daerah kabupaten/kota penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Cilacap

peranan sektor pertanian apabila dibandingkan dengan PDRB-nya, dimana minyak bumi diperhitungkan, maka besarnya peranan pertanian sebesar 17,19 persen. Akan tetapi apabila produksi kilang minyak dikeluarkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 40,59 persen.

Sama halnya dengan Kabupaten Blora sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 50,50 persen dimana pengaruh minyak bumi masih ada, tetapi apabila pengaruh minyak bumi dikeluarkan, sumbangan sektor pertanian menjadi sebesar 53,63 persen pada tahun 1998 atas dasar harga berlaku.

Di tingkat Jawa Tengah sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB dengan migas tahun 1998 sebesar 25,58 persen, dan apabila pengaruh minyak bumi dari 2 daerah tersebut dikeluarkan sumbangannya berubah menjadi 26,90 persen.

Sektor selanjutnya adalah sektor industri pengolahan, dimana sektor tersebut hampir di seluruh Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang relatif besar. Keberadaan sektor industri yang berfungsi untuk mengolah lebih lanjut hasil-hasil pertanian dan pertambangan menjadi produk yang lebih tinggi manfaatnya dan mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan.

Tabel D. Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Daerah Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1993 dan 1998 (Dengan Migas)		
Peranan (Persen)	Daerah Kabupaten/kota	
	1993	1998
0 - 4,99	Kab. Grobogan, Kab. Rembang	Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan
5,00 - 9,99	Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kab. Wonogiri	Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Brebes, Kab. Rembang, Kota Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo
10,00 - 14,99	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Sragen, Kab. Demak, Kab. Pemalang, Kota Tegal	Kab. Banjarnegara, Kab. Sragen, Kab. Pati, Kab. Demak
15,00 - 19,99	Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Tegal, Kota Surakarta,	Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Temanggung, Kab. Pemalang, Kab. Boyolali, Kota Tegal,
20,00 - 24,99	Kab. Sukoharjo, Kota Salatiga, Kota Pekalongan	Kab. Banyumas, Kab. Tegal, Kota Salatiga, Kota Pekalongan,
25,00 - 29,99	Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Semarang	Kab. Pekalongan, Kab. Sukoharjo, Kab. Jepara, Kota Semarang
30,00 +	Kab. Cilacap, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang	Kab. Cilacap, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kab. Batang

Dari Tabel D. bisa dilihat bahwa untuk kelompok 0 - 4,99 persen mengalami perubahan yaitu pada tahun 1993 mencakup Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Rembang, sedang pada tahun 1998 mencakup Kabupaten Wonogiri dan Grobogan. Kedudukan tersebut karena perkembangan sektor industri di kedua wilayah tersebut lambat

Kelompok selanjutnya adalah kelompok (5,00 - 9,99 persen). Kelompok ini juga mengalami perubahan walaupun jumlah Daerah kabupaten/kota masih tetap sebanyak 8 Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan ini dialami oleh Kabupaten Pati dimana pada tahun 1993 perannya sebesar 9,89 persen dan tahun 1998 sebesar 12,04 persen (kelompok 10 -

14,99 persen), sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri pada tahun 1993 sebesar 5,52 persen dan tahun 1998 perannya sebesar 4,81 persen (kelompok 0 - 4,99 persen).

Untuk kelompok 10,00 - 14,99 terdapat perubahan yang dialami oleh 4 Daerah Kabupaten/Kota lonjakan besar dialami Kabupaten Banyumas pada tahun 1993 perannya sebesar 11,40 persen dan pada tahun 1998 perannya sebesar 21,82 persen.

Keadaan yang sama juga dialami oleh kelompok peranan (15,00 - 19,99 persen). Pada kelompok ini terdapat 3 Daerah kabupaten/kota yang mengalami perpindahan kelompok ialah Kabupaten Jepara pada tahun 1993 perannya sebesar 18,70 persen dan pada tahun 1998 sebesar

Grafik 4. Peranan Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 1998



28,36 persen, Kabupaten Tegal pada tahun 1993 peranannya 18,16 persen dan untuk 1998 sebesar 23,62 persen, dan Kota Surakarta pada tahun 1993 peranannya sebesar 16,51 persen dan untuk tahun 1998 sebesar 32,99 persen. Pada kelompok 20,00 - 24,99 terdapat 1 Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami perpindahan yaitu Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1993 peranannya sebesar 21,56 persen dan pada tahun 1998 peranannya sebesar 27,5 persen.

Pada kelompok (25,00 - 29,99 persen) pada tahun 1993 terdapat 3 Daerah kabupaten/kota, untuk tahun 1998 berubah menjadi 4 Daerah Kabupaten/Kota, sedang untuk kelompok 30+ pada tahun 1993

terdapat 5 Daerah Kabupaten/Kota, sedang untuk tahun 1998 menjadi 7 Daerah kabupaten/kota.

Sektor selanjutnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor ini mempunyai pengaruh yang relatif besar hampir di seluruh Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dibandingkan sub sektor hotel dan restoran, sub sektor perdagangan mempunyai peran terbesar dari tahun ke tahun, karena melayani permintaan baik di kegiatan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan pertanian dan konsumen akhir, serta melakukan pendistribusian produk dalam bentuk barang yang berasal dari daerah maupun luar daerah.

Grafik 5. Peranan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 1998



Tabel E. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran Terhadap PDRB Daerah Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1993 dan 1998 (Dengan Migas)

Peranan (Persen)	Daerah Kabupaten/kota	
	1993	1998
0 - 9,99	Kota Magelang	Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri
10,00 - 14,99	Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Temanggung, Kab. Magelang	Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Sragen,
15,00 - 19,99	Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Sukoharjo, Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Karanganyar, Kab. Barang, Kab. Semarang, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Kab. Karanganyar, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Batang
20,00 - 24,99	Kab. Pemalang, Kab. Jepara, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Brebes	Kab. Pekalongan, Kab. Jepara, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Klaten
25,00 ke atas	Kab. Cilacap, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Tegal, Kab. Kudus, Kota Semarang	Kab. Cilacap, Kab. Boyolali, Kab. Tegal, Kab. Kudus, Kota Semarang, Kota Tegal

Apabila dilihat Tabel E, ditunjukkan bahwa perkembangan peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 1993 - 1998, terdapat 1 (satu) Daerah kabupaten/kota (1993) dan 3 Daerah kabupaten/kota (1998), yang mempunyai peranan relatif kecil atau di bawah 10 persen yaitu Kota Magelang sebesar 7,71 persen (1993). Untuk tahun 1998 masih dialami juga oleh kota Magelang sebesar 7,78 persen, Kabupaten

Wonogiri sebesar 8,73 persen, dan Kabupaten Temanggung sebesar 8,46 persen.

Turunnya kelompok peranan Kabupaten Wonogiri pada tahun 1993 sebesar 16,07 persen dan tahun 1998 sebesar 8,73 persen, karena sektor industri pengolahan tumbuh relatif kecil. Sebaliknya kelompok peranan teratas (25,00 persen ke atas) diduduki oleh 6 Daerah kabupaten/kota untuk tahun 1993 yaitu Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Sedang untuk tahun 1998 juga diduduki 6 Daerah kabupaten/kota

yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Tegal.

Peranan (Persen)	Daerah Kabupaten/kota	
	1993	1998
0 - 4,99	Kab. Cilacap, Kab. Kudus	Kab. Cilacap, Kab. Kudus, Kab. Brebes
5,00 - 9,99	Kab. Sragen, Kab. Wonosobo, Kab. Pati, Kab. Brebes, Kab. Kendal, Kab. Jepara	Kab. Sragen, Kab. Pemalang, Kab. Boyolali, Kab. Jepara, Kab. Wonosobo, Kab. Pati, Kab. Kendal, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, Kab. Tegal
10,00-14,99	Kab. Pemalang, Kab. Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Batang, Kab. Tegal, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Semarang, Kota Tegal, Kab. Blora, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Kab. Grobogan, Kota Semarang, Kota Pekalongan	Kota Surakarta, Kab. Banjarnegara, Kab. Rembang, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kota Semarang, Kab. Batang, Kab. Karanganyar, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kota Tegal, Kab. Sukoharjo, Kab. Banyumas
15,00 - 19,99	Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Temanggung, Kota Surakarta	Kab. Temanggung, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo
20,00 ke atas	Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kota Magelang, Kota Salatiga	Kota Magelang, Kota Salatiga

Tabel F menunjukkan peranan sektor jasa-jasa di setiap Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 1993 dan 1998. Dari 35 Daerah Kabupaten/Kota peranan sektor jasa-jasa terdapat 31 Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 1993 dan 33 Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 1998 yang peranannya di bawah 20 persen. Sedangkan Daerah Kabupaten/Kota yang peranannya di atas 20 persen pada tahun 1993 terdapat 4 Daerah Kabupaten/Kota

ialah Kab. Purbalingga sebesar 25,33 persen, Kabupaten Purworejo sebesar 23,52 persen, Kota Magelang sebesar 30,80 persen, dan Kota Salatiga sebesar 24,52 persen. Daerah Kabupaten/Kota yang peranannya di atas 20 persen pada tahun 1998 terdapat 2 Daerah Kabupaten/Kota ialah Kota Magelang sebesar 37,06 persen dan Kota Salatiga 27,32 persen.

Grafik 6. Peranan Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 1998



2.2.1.b. Perubahan Struktur Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 1996 sampai dengan 1998

Penyediaan data PDRB secara berkala dapat digunakan untuk melihat perubahan struktur perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Perubahan tersebut menggambarkan ketergantungan ekonomi Daerah Kabupaten/Kota akan sektor-sektor produksinya. Berikut ini akan disajikan perbandingan peranan sektor ekonomi tahun 1996 sampai dengan

1998 (sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa-jasa) yang merupakan sektor-sektor dominan dalam pembentukan perekonomian daerah. Perbandingan tersebut dapat dipergunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi, sehingga dapat diketahui pergeseran peranan atas sektor-sektor ekonomi.

Sektor Pertanian

Hampir pada setiap daerah kabupaten/kota sektor pertanian sebagai sektor primer masih merupakan sektor andalan dalam pembentukan ekonomi daerah. Kemudian pada beberapa tahun terakhir, peranan sektor ini mengalami penurunan, disebabkan makin berperannya sektor sekunder dan sektor tersier. Untuk lebih jelasnya perubahan peranan sektor pertanian pada tahun 1996 sampai dengan 1998 bisa dilihat pada Tabel G. Pada tahun 1996 kondisi sektor pertanian di seluruh Daerah Kabupaten/Kota perannya sebagian besar di atas 20,00 persen, di sini

masih mencerminkan bahwa Jawa Tengah merupakan daerah agraris. Setelah berjalan dalam kurun waktu 3 tahun, struktur perekonomian berangsur-angsur berubah perannya. Bila selama tahun 1993 - 1996 sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan peranan sektor pertanian, maka untuk tahun 1996 - 1998 sebagian besar daerah kabupaten/kota peranan sektor pertanian meningkat. Tahun 1997 terdapat 17 Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan peranan, sedang pada tahun 1998 terdapat 33 Daerah kabupaten / kota yang mengalami peningkatan peranan

Tabel G. Peranan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 1996-1998 Atas Dasar Harga Berlaku per Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Migas)

No	Kabupaten/kota	Peranan (%)			Perubahan (%)		No	Kabupaten/kota	Peranan (%)			Perubahan (%)	
		1996	1997	1998	96-97	97-98			1996	1997	1998	96-97	97-98
	Kabupaten						Kabupaten						
1.	Cilacap	14,13	12,88	17,19	-1,25	4,31	19.	Kudus	3,19	3,56	4,11	0,38	0,55
2.	Banyumas	14,13	29,23	30,29	0,77	1,06	20.	Jepara	30,08	27,68	24,13	-2,40	-3,56
3.	Purbalingga	28,46	33,88	39,72	-0,63	5,84	21.	Demak	40,98	40,95	47,19	-0,03	6,24
4.	Banjarnegara	34,51	41,24	49,74	2,61	8,49	22.	Semarang	19,82	18,75	22,14	-1,07	3,39
5.	Kebumen	38,63	41,26	45,35	-3,37	4,09	23.	Temanggung	33,43	30,86	39,44	-2,57	8,58
6.	Purworejo	44,64	33,74	41,50	1,38	7,76	24.	Kendal	23,20	22,83	25,78	-0,37	2,96
7.	Wonosobo	32,35	51,85	37,13	0,34	5,28	25.	Batang	27,34	25,42	30,19	-1,92	4,77
8.	Magelang	51,51	39,84	38,06	-1,19	-1,78	26.	Pekalongan	21,83	21,26	22,86	-0,58	1,60
9.	Boyolali	41,03	32,37	39,46	0,33	7,09	27.	Pemalang	35,29	34,20	38,70	-1,90	4,51
10.	Klaten	32,03	25,00	28,69	0,52	3,69	28.	Tegal	22,44	23,52	29,34	1,07	5,82
11.	Sukoharjo	24,48	24,92	27,43	0,95	2,51	29.	Brebes	47,70	51,33	54,47	3,64	3,13
12.	Wonogiri	23,97	48,83	59,22	-0,40	10,39		Kota					
13.	Karanganyar	49,22	18,81	21,20	-1,50	2,39	30.	Magelang	3,84	3,57	4,01	-0,27	0,44
14.	Sragen	20,31	38,77	46,93	-3,65	8,16	31.	Surakarta	1,50	1,57	2,19	0,07	0,62
15.	Grobogan	42,42	41,90	47,56	-4,97	5,66	32.	Salatiga	4,60	4,99	6,03	0,39	1,03
16.	Blora	46,87	47,31	50,50	5,24	3,19	33.	Semarang	1,57	1,59	1,86	0,02	0,27
17.	Rembang	42,06	43,58	52,06	0,20	8,48	34.	Pekalongan	12,98	12,25	17,58	-0,74	5,33
18.	Pati	43,38	43,83	49,67	1,39	5,83	35.	Tegal	11,49	11,33	13,15	-0,17	1,82
								Prop. Jateng	21,78	21,78	25,58	0,09	3,71

sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sejak pertengahan tahun 1997, terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan sektor-sektor ekonomi seperti industri, bangunan dan keuangan mengalami goncangan dan mengakibatkan peranan sektor-sektor

tersebut mengalami penurunan dan sektor pertanian yang tetap bertahan selama krisis ekonomi secara tidak langsung mengalami peningkatan peranan.

Sektor Industri

Sektor industri yang ditampilkan di sini adalah peranan sektor industri keadaan tahun 1996 sampai dengan 1998 menurut Daerah kabupaten/kota. Sedangkan sektor tersebut menyebar di seluruh Daerah kabupaten/kota. Besarnya peranan sektor ini selain tergantung dari kemampuan daerah untuk melakukan proses pengolahan dari barang mentah/setengah jadi menjadi barang jadi, akan tetapi juga kemampuan memasarkan, untuk bersaing dengan produk lainnya. Dari Tabel H bisa dilihat bahwa sebagian besar Daerah Kabupaten/Kota untuk tahun 1996 - 1997 mengalami kenaikan, sedang untuk tahun 1998 sebagian besar daerah kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan industri terutama industri besar banyak yang menghentikan / mengurangi produksinya.

TABEL H.
Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 1996 - 1998
Atas Dasar Harga Berlaku per Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Migas)

No	Daerah Kabupaten/kota	Peranan (%)			Perubahan (%)	
		1996	1997	1998	96-97	97-98
1.	KAB CILACAP	43,83	46,26	44,91	-1,35	-1,08
2.	KAB BANYUMAS	17,86	12,45	13,32	0,87	-0,05
3.	KAB PURBALINGGA	10,36	10,59	10,21	-0,38	0
4.	KAB BANJARNEGARA	18,00	13,97	16,58	2,61	1,44
5.	KAB KEBUMEN	7,26	5,73	6,71	0,98	0,55
6.	KAB PURWOREJO	8,81	8,5	8,77	0,27	0,04
7.	KAB WONOSOBO	5,16	5,9	5,11	-0,79	-0,42
8.	KAB MAGELANG	17,74	19,14	18,34	-0,6	-0,77
9.	KAB BOYOLALI	20,23	20,57	20,71	0,14	-0,48
10.	KAB KLATEN	19,68	18,84	19,36	0,52	0,32
11.	KAB SUKOHARJO	30,58	23,23	24,64	1,41	1,18
12.	KAB WONOGIRI	5,77	5,47	5,52	0,05	1,31
13.	KAB KARANGANYAR	41,04	35,1	38,65	3,55	1,2
14.	KAB SRAGEN	15,58	12,88	13,72	0,84	1,86
15.	KAB GROBOGAN	2,69	2,6	2,76	0,16	0,22
16.	KAB BLORA	5,16	5,53	6,09	0,56	-0,07
17.	KAB REMBANG	4,29	4,53	4,78	0,25	0,96
18.	KAB PATI	9,89	14,93	14,62	-0,31	0,9
19.	KAB KUDUS	61,55	61,26	61,9	0,64	-0,04
20.	KAB JEPARA	18,7	21,14	21,11	-0,03	1,31
21.	KAB DEMAK	13,48	13,09	13,35	0,26	1,17
22.	KAB SEMARANG	26,23	30,36	31,35	0,99	4,99
23.	KAB TEMANGGUNG	17,73	17,51	16,4	-1,11	-0,52
24.	KAB KENDAL	39,46	39,94	40,19	0,25	1,72
25.	KAB BATANG	28,91	29,5	29,08	-0,42	0,88
26.	KAB PEKALONGAN	25,52	27,89	28,97	1,08	0,5
27.	KAB PEMALANG	13,51	14,57	15,43	0,86	1,73
28.	KAB TEGAL	18,16	19,81	21,77	1,96	2,58
29.	KAB BREBES	8,4	9,42	8,75	-0,67	0,4
30.	KOTA MAGELANG	7,52	8,64	8,71	0,07	0,2
31.	KOTA SURAKARTA	16,51	16,72	23,82	7,1	1,01
32.	KOTA SALATIGA	21,46	20,89	20,86	-0,03	0,55
33.	KOTA SEMARANG	26,27	27,12	28,99	1,87	1,15
34.	KOTA PEKALONGAN	17,26	18,59	20,94	2,35	0,27
35.	KOTA TEGAL	14,35	17,73	17,8	0,07	0,55
PROPINSI JATENG		32,18	32,02	27,72	-0,16	-4,30

Sektor Perdagangan

Dari Tabel 1 dapat dilihat perubahan peranan sektor perdagangan selama tahun 1996 sampai dengan 1998 seluruh daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk tahun 1997- 1998 kenaikan tertinggi ditempati oleh Kota Semarang dan masih terdapat 20 Daerah Kabupaten/Kota yang

mengalami kenaikan peranan. Selain 21 Daerah Kabupaten/Kota sisanya sebanyak 14 Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan peranan. Penurunan yang paling kecil ditempati oleh Kab. Wonogiri sebesar minus 4,66 persen. Perubahan peranan selama tahun 1996 sampai dengan 1998 relatif kecil (di bawah 6 persen).

TABEL 1
Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Terhadap PDRB Tahun 1996 sampai dengan 1998
Atas Dasar Harga Berlaku per Daerah kabupaten/Kota (Dengan Migas)

Kabupaten/kota	Peranan (%)			Perubahan (%)		No	Kabupaten/kota	Peranan (%)			Perubahan (%)	
	1996	1997	1998	96-97	97-98			1996	1997	1998	96-97	97-98
KABUPATEN							KABUPATEN					
1. CILACAP	32,56	31,44	32,16	-1,12	0,71	19. KUDUS	27,10	26,84	27,22	-0,26	0,39	
2. BANYUMAS	13,40	13,53	15,18	0,13	1,65	20. JEPARA	21,96	22,20	24,66	0,24	2,46	
3. PURBALINGGA	17,25	17,58	18,17	0,33	0,59	21. DEMAK	20,26	20,69	21,36	0,43	0,67	
4. BANJARNEGARA	13,58	12,99	12,75	-0,59	-0,24	22. SEMARANG	17,31	17,56	17,85	0,25	0,29	
5. KEBUMEN	16,64	17,57	16,40	0,92	-1,16	23. TEMANGGUNG	12,16	11,55	8,46	-0,62	-3,09	
6. PURWOREJO	17,68	17,36	17,97	-0,32	0,61	24. KENDAL	18,14	17,45	19,09	-0,69	1,65	
7. WONOSOBO	12,23	12,15	13,88	-0,08	1,73	25. BATANG	19,14	19,39	17,11	0,25	-2,28	
8. MAGELANG	14,04	14,15	15,03	0,10	0,88	26. PEKALONGAN	20,36	20,33	20,72	-0,03	0,39	
9. BOYOLALI	26,50	26,40	26,48	-0,10	0,08	27. PEMALANG	23,18	23,80	23,80	0,63	-1,44	
10. KLATEN	28,08	27,49	24,73	-0,59	-2,76	28. TEGAL	23,96	25,08	25,08	1,13	-0,08	
11. SUKOHARJO	19,63	20,01	19,85	0,38	-0,16	29. BREBES	24,63	23,47	23,47	-1,16	-0,84	
12. WONOGIRI	13,69	13,38	8,73	-0,31	-4,66	KOTA	8,63	8,34	8,34	-0,29	-0,56	
13. KARANGANYAR	15,03	15,43	15,57	0,40	0,15	30. MAGELANG	8,63	8,34	8,34	-0,29	-0,56	
14. SRAGEN	14,55	14,90	14,09	0,35	-0,81	31. SURAKARTA	22,56	22,86	22,86	0,30	-2,05	
15. GROBOGAN	17,90	17,36	18,87	-0,54	1,51	32. SALATIGA	19,07	18,32	18,32	-0,75	1,42	
16. BLORA	17,67	16,73	15,38	-0,95	-1,35	33. SEMARANG	33,85	34,77	34,77	0,92	5,90	
17. REMBANG	16,56	16,42	17,74	-0,14	1,32	34. PEKALONGAN	19,90	19,87	19,87	-0,03	2,88	
18. PATI	15,92	15,91	17,02	-0,01	1,11	35. TEGAL	24,41	23,80	23,80	-0,61	5,48	
						Prop. Jateng	20,93	21,08	23,60	0,15	2,52	

Sektor Jasa-jasa

Dari Tabel J dapat dilihat peranan masing-masing daerah kabupaten/kota selama kurun waktu 1996 sampai dengan 1998 perubahannya relatif kecil. Untuk keadaan tahun 1997 ke 1998 terdapat 9 (sembilan) daerah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan peranan. Kenaikan peranan sektor jasa-jasa sangat dipengaruhi oleh subsektor pemerintahan.

Diberlakukannya zero growth (pertumbuhan nol) untuk penambahan pegawai negeri sangat mempengaruhi peranan jasa, karena sejauh ini peranan sub sektor pemerintahan cukup besar untuk sektor jasa. Dari kondisi tersebut, 29 daerah kabupaten/kota pada tahun 1998 mengalami penurunan peranan, bila dibandingkan pada tahun 1997. Penurunan peranan sektor jasa-jasa tersebut merupakan dampak rendahnya laju pertumbuhan sektor jasa-jasa dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lainnya.

TABEL J.
Peranan Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB Tahun 1996 - 1998
Atas Dasar Harga Berlaku per Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Migas)

No.	Daerah Kabupaten/kota	Peranan (%)			Perubahan (%)	
		1996	1997	1998	96-97	97-98
1.	KAB CILACAP	3,62	3,48	2,76	-0,14	0,29
2.	KAB BANYUMAS	17,44	16,59	13,27	-0,85	-0,55
3.	KAB PURBALINGGA	22,76	22,32	18,59	-0,43	0,61
4.	KAB BANJARNEGARA	12,80	13,74	11,00	0,94	-0,59
5.	KAB KEBUMEN	15,77	15,80	14,10	0,03	-0,12
6.	KAB PURWOREJO	22,49	22,58	17,86	0,09	-0,37
7.	KAB WONOSOBO	7,57	8,30	6,72	0,73	-0,09
8.	KAB MAGELANG	10,57	11,27	12,11	0,71	-0,31
9.	KAB BOYOLALI	9,49	9,26	6,69	-0,24	-0,02
10.	KAB KLATEN	10,67	10,85	12,28	0,18	-0,35
11.	KAB SUKOHARJO	12,02	11,72	10,95	-0,30	-0,41
12.	KAB WONOGIRI	11,93	11,68	9,39	-0,26	-0,16
13.	KAB KARANGANYAR	12,49	12,20	12,21	-0,29	-0,35
14.	KAB SRAGEN	9,44	9,30	9,38	-0,14	-0,24
15.	KAB GROBOGAN	15,32	16,77	15,51	1,45	0,14
16.	KAB BLORA	11,27	9,58	8,51	-1,70	-0,63
17.	KAB REMBANG	13,11	13,36	10,38	0,25	-0,31
18.	KAB PATI	8,23	8,40	6,75	0,17	0,08
19.	KAB KUDUS	2,60	2,79	2,76	0,20	-0,03
20.	KAB JEPARA	8,83	8,87	8,49	0,04	-0,09
21.	KAB DEMAK	12,82	12,23	11,04	-0,59	-0,11
22.	KAB SEMARANG	8,66	8,45	10,22	-0,21	-1,38
23.	KAB TEMANGGUNG	19,47	19,90	19,62	0,43	0,35
24.	KAB KENDAL	7,74	6,91	7,70	-0,82	-0,34
25.	KAB BATANG	12,07	12,07	10,97	0,00	-0,16
26.	KAB PEKALONGAN	12,35	13,44	11,85	1,09	-0,53
27.	KAB PEMALANG	8,95	8,77	8,70	-0,18	-0,56
28.	KAB TEGAL	10,01	8,96	7,57	-1,05	-0,52
29.	KAB BREBES	6,05	5,82	4,56	-0,23	-0,33
30.	KOTA MAGELANG	29,47	31,40	37,06	1,92	-2,67
31.	KOTA SURAKARTA	12,23	12,21	11,54	-0,03	-0,59
32.	KOTA SALATIGA	26,77	26,19	27,32	-0,58	0,81
33.	KOTA SEMARANG	11,99	11,07	11,05	-0,92	-0,8
34.	KOTA PEKALONGAN	12,16	12,27	12,44	0,12	-0,76
35.	KOTA TEGAL	11,91	11,49	11,24	-0,41	-0,29
PROPINSI JATENG		9,77	9,53	9,93	-0,24	0,40

2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran hasil-hasil pembangunan yang dicapai, khususnya dalam bidang ekonomi. Keberhasilan ekonomi daerah sebenarnya tidak akan lepas dengan kebijaksanaan pembangunan yang diberlakukan di daerah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, dibentuk oleh berbagai macam sektor (sistem KLUI sembilan sektor). Dari sektor yang ada diharapkan bisa saling memenuhi pencapaian sasaran Repelita yang telah dituangkan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil, tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan 1993, dari Tabel K.1.

Berikut ini disajikan tabel laju pertumbuhan ekonomi seluruh Daerah Kabupaten/Kota termasuk minyak bumi (Tabel K.1) dan tanpa minyak bumi (Tabel K.2) tahun 1998 yang digolongkan menurut batas kelas tertentu.

Dari Tabel K.1 menunjukkan bahwa pada tahun 1998 pertumbuhan di atas minus

7,5 persen terdapat di 15 Daerah Kabupaten/Kota, karena daerah tersebut mempunyai sektor-sektor

Tabel K.1.
Laju Pertumbuhan Seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1998 (Dengan Migas)

Laju Pertumbuhan (Persen)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah
-20 - -17,51	Kab. Semarang, Kota Semarang	2
-17,50 - -15,01	-	-
-15,00 - -12,51	Kab. Kebumen, Kota Surakarta	2
-12,50 - -10,01	Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Rembang, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang	9
-10,00 - -7,51	Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Pekalongan	7
-7,50 - -5,01	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kota Magelang, Kota Tegal	6
-5,00 - -2,51	Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Pati	4
-2,50 - 0,00	Kab. Pemasang, Kota Salatiga	2
0+	Kab. Jepara, Kab. Brebes, Kab. Cilacap	3

Tabel K.2.
Laju Pertumbuhan Seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1998 (Tanpa Migas)

Laju Pertumbuhan (Persen)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah
-20 - -17,51	Kab. Semarang, Kota Semarang	2
-17,50 - -15,01	-	-
-15,00 - -12,51	Kab. Kebumen, Kota Surakarta	2
-12,50 - -10,01	Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Rembang, Kab. Kudus, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang	9
-10,00 - -7,51	Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Pekalongan	7
-7,50 - -5,01	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kota Magelang, Kota Tegal, Kab. Cilacap	7
-5,00 - -2,51	Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kab. Wonogiri, Kab. Pati	4
-2,50 - 0,00	Kab. Pemasang, Kota Salatiga	2
0+	Kab. Jepara, Kab. Brebes	2

andalan. Sedangkan tingkat pertumbuhan di bawah minus 7,5 persen sebanyak 20 Daerah

Kabupaten/Kota adalah pertumbuhan yang labil yang pada suatu saat bisa berubah di kelompok pertumbuhan yang lain. Ketidakstabilan kondisi ekonomi di daerah-daerah tersebut walaupun memiliki sektor andalan, akan tetapi sangat tergantung dari pengendalian di Pusat, di samping itu juga tidak memiliki sektor andalan yang dominan. Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh

pertumbuhan ekonomi tanpa migas (Tabel K.2.).

Kabupaten Cilacap, pengaruh industri pengilangan sangat kuat sekali, misalnya untuk tahun 1996 pertumbuhannya sebesar 11,63 persen (dengan migas) sedangkan pertumbuhan tanpa migas sebesar minus 5,32 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi industri pengilangan di Kab. Cilacap.



Grafik 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Tanpa Migas Tahun 1998



2.4. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita Daerah Kabupaten/Kota Keadaan Tahun 1993 dan 1998

Tabel L.1 menunjukkan penyebaran PDRB per kapita (dengan migas) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 1993.

Di dalam tabel tersebut terlihat bahwa Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai PDRB per kapita di bawah 1,0 juta rupiah terdapat 23 (dua puluh tiga) daerah Kabupaten/Kota, yang berarti masih di bawah angka PDRB per kapita Jawa Tengah 1 166 804,57 rupiah sedangkan sisanya sebanyak 12 Daerah Kabupaten/Kota PDRB per kapitanya di atas 1,0 juta rupiah, akan tetapi terdapat dua Daerah Kabupaten/Kota masih berada di bawah angka Jawa Tengah ialah

PDRB Per kapita (000 Rp)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jml
0 - 999	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Temanggung, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes	23
1000 - 1499	Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kota. Tegal, Kota. Pekalongan	5
1500 - 1999	Kab. Kendal, Kota. Surakarta, Kota. Salatiga	3
2000 ke atas	Kab. Cilacap, Kab. Kudus, Kota. Magelang, Kota. Semarang	4

Sukoharjo sebesar 1 145 541,51 rupiah, Batang sebesar 1 025 132,83 rupiah yang berarti seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang berada di atas Jawa Tengah sebanyak 10 Daerah Kabupaten/Kota. Angka tertinggi PDRB per kapita pada tahun 1993 ialah sebesar 4 228 450,92 rupiah ditempati oleh Kab. Kudus.

Keadaan PDRB per kapita (tanpa migas) tidak banyak terjadi perbedaan pada tahun 1993 (bisa dilihat Tabel L.2) yang artinya bahwa Daerah Kabupaten/Kota yang PDRBnya di bawah 1,0 juta rupiah masih tetap ditempati oleh 23 Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan letak perbedaan hanya terjadi pada Daerah Kabupaten/Kota penghasil minyak (Kab. Cilacap).

Pada tahun 1993 (dengan minyak) PDRB per kapita 3 276 789,50 rupiah berada di kelompok 2,0 juta rupiah ke atas, sedangkan PDRB perkapita tanpa migas 1 925 424,69 rupiah dan berada di kelompok di bawah 2,0 juta rupiah.

Tabel L.3 menggambarkan penyebaran dari PDRB per kapita perhitungan dengan migas tahun 1998 dan Tabel L.4 PDRB per kapita perhitungan tanpa migas tahun 1998. Dari kedua tabel tersebut digambarkan bahwa keadaan pada tahun 1998 baik perhitungan dengan migas maupun tanpa migas tidak banyak terjadi perbedaan penyebaran. Letak perbedaan terjadi di Kab. Blora, pada tahun 1998 perhitungan dengan migas sebesar 1 648 798,90 rupiah dan tanpa migas sebesar 1 247 468,85 rupiah. Kab. Cilacap secara nominal juga

PDRB Per kapita (000 Rp)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jml
0 - 999	Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Temanggung, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes	23
1000 - 1499	Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kota. Tegal, Kota. Pekalongan	5
1500 - 1999	Kab. Kendal, Kota. Surakarta, Kota. Salatiga, Kab. Cilacap	4
2000 ke atas	Kab. Kudus, Kota. Magelang, Kota. Semarang	3

PDRB Per kapita (000 Rp)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jml
0 - 999	-	0
1000 - 1499	Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal	7
1500 - 1999	Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Brebes	10
2000 ke atas	Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota. Magelang, Kota. Surakarta, Kota. Salatiga, Kota. Magelang, Kota. Surakarta, Kota. Semarang, Kota. Pekalongan, Kota. Salatiga, kota Tegal	18

terjadi perbedaan PDRB per kapita, dimana pada tahun 1998 perhitungan dengan migas sebesar 7 018 508,58 rupiah dan tanpa migas sebesar 4 099 124,87 rupiah walaupun keduanya dalam kelompok yang sama (di atas 2,0 juta rupiah). Untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya (sebanyak 33 Daerah Kabupaten/Kota) perhitungan PDRB dengan migas pada tahun 1998 banyaknya Daerah Kabupaten/Kota per kelompok sama/tetap.

PDRB Per kapita (000 Rp)	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah
0 - 999	-	0
1000 - 1499	Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Blora	8
1500 - 1999	Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Brebes	9
2000 ke atas	Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal	18

Kadaan Tahun 1996 sampai dengan 1998

Tabel M.1 bertujuan antara lain memberikan gambaran, tingkat perubahan atas perkembangan PDRB per kapita dengan migas di masing-masing Daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah. Pada umumnya untuk kepentingan analisa, apabila pengaruh harga yang terjadi diperhitungkan, maka nilai tambah (value added) yang digunakan adalah atas dasar harga berlaku. Dari Tabel M.1 terlihat bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di seluruh Daerah Kabupaten/Kota, selama tahun 1996 - 1997 terjadi perubahan yang cukup berarti. Perubahan terbesar terjadi di Kab. Purworejo pada tahun 1996 PDRB per kapitanya sebesar 1 148 692,96 rupiah dan tahun 1997 sebesar 1 426 812,62 rupiah (naik 24,21 persen). Tingginya kenaikan PDRB per kapita Kab. Purworejo disebabkan karena perekonomian

naik dengan pesat, sedangkan penduduk menurun. Pertumbuhan yang terendah selama tahun 1996 - 1997 dialami oleh Kab. Kudus dimana pada tahun 1996 PDRB per kapitanya sebesar 6 701 800,46 rupiah dan pada tahun 1997 menjadi 7 006 136,53 rupiah atau naik 4,54 persen.

Selama tahun 1997- 1998 perubahan PDRB per kapita terbesar terjadi di Kab. Cilacap sebesar 69,08 persen dan perubahan terendah dialami oleh Kota Semarang sebesar 25,74 persen.

Perkembangan PDRB per kapita tanpa migas bisa dilihat Tabel M.2. Perubahan yang terjadi hingga tahun 1996 cenderung bervariasi. Perubahan terbesar dan terendah pada tahun 1996 - 1997 sama seperti perubahan PDRB per kapita dengan migas. Sedang selama tahun 1997 - 1998 perubahan terbesar dialami oleh Kab. Cilacap (124,87 persen) dan perubahan terendah terjadi di Kota Semarang (25,74 persen).

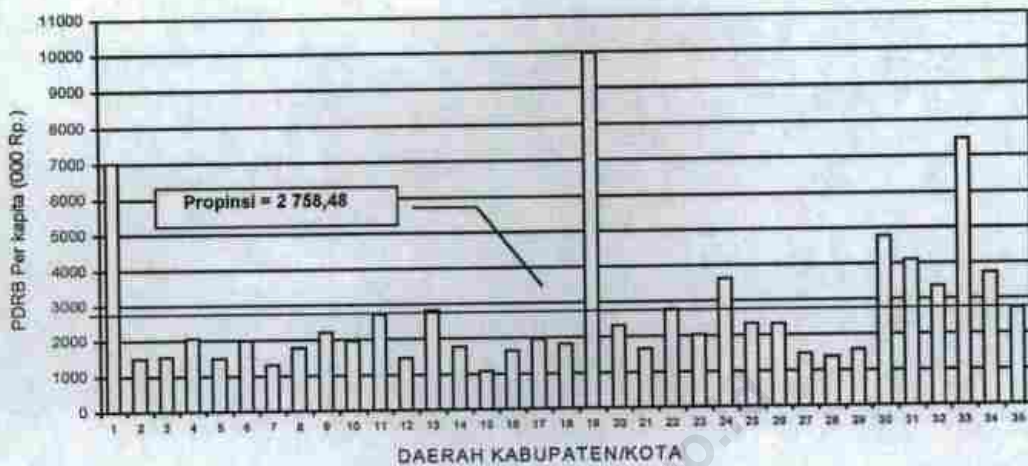
TABEL M.1.
PDRB PER KAPITA DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN 1998 (Rupiah)

No.	Daerah Kabupaten/kota	1996	1997	1998	Perubahan (%)	
					96-97	97-98
1.	KAB CILACAP	3 739 437,70	4 150 960,57	7 018 508,58	11,00	69,08
2.	KAB BANYUMAS	886 729,69	1 020 212,09	1 483 921,55	15,05	45,45
3.	KAB PURBALINGGA	993 424,61	1 136 902,20	1 540 905,90	14,44	35,54
4.	KAB BANJARNEGARA	1 234 748,41	1 387 700,32	2 063 953,30	12,39	48,73
5.	KAB KEBUMEN	1 029 536,84	1 113 422,96	1 487 440,11	8,15	33,59
6.	KAB PURWOREJO	1 148 692,96	1 426 812,62	1 983 472,34	24,21	39,01
7.	KAB WONOSOBO	918 140,78	968 066,99	1 300 723,86	5,44	34,36
8.	KAB MAGELANG	1 201 951,01	1 336 539,03	1 784 550,66	11,20	33,52
9.	KAB BOYOLALI	1 328 321,72	1 486 764,26	2 218 343,49	11,93	49,21
10.	KAB KLATEN	1 216 527,11	1 386 053,24	1 950 637,52	13,94	40,73
11.	KAB SUKOHARJO	1 865 697,44	2 138 613,06	2 702 393,67	14,63	26,36
12.	KAB WONOGIRI	913 207,85	997 075,39	1 468 713,45	9,18	47,30
13.	KAB KARANGANYAR	1 855 609,85	2 030 716,87	2 817 239,01	9,44	38,73
14.	KAB SRAGEN	1 063 035,87	1 160 014,03	1 766 139,95	9,12	52,25
15.	KAB GROBOGAN	765 776,29	805 162,56	1 078 441,28	5,14	33,94
16.	KAB BLORA	1 027 017,27	1 228 130,70	1 648 798,90	19,58	34,25
17.	KAB REMBANG	1 170 738,33	1 319 756,64	1 958 314,43	12,73	48,38
18.	KAB PATI	1 114 408,32	1 245 883,90	1 808 826,07	11,80	45,18
19.	KAB KUDUS	6 701 800,46	7 006 136,53	9 974 740,29	4,54	42,37
20.	KAB JEPARA	1 386 460,57	1 557 888,85	2 328 564,59	12,36	49,47
21.	KAB DEMAK	1 059 458,56	1 189 720,03	1 647 518,95	12,30	38,48
22.	KAB SEMARANG	1 869 246,21	2 081 763,59	2 767 507,00	11,37	32,94
23.	KAB TEMANGGUNG	1 368 319,67	1 486 953,55	2 043 498,26	8,67	37,43
24.	KAB KENDAL	2 340 817,75	2 749 054,91	3 623 214,18	17,44	31,80
25.	KAB BATANG	1 532 512,06	1 688 037,63	2 342 924,94	10,15	38,80
26.	KAB PEKALONGAN	1 418 939,09	1 662 763,01	2 329 280,28	17,18	40,08
27.	KAB PEMALANG	1 013 465,45	1 125 056,11	1 477 131,51	11,01	31,29
28.	KAB TEGAL	868 119,33	976 771,40	1 377 338,71	12,52	41,01
29.	KAB BREBES	970 271,35	1 134 992,41	1 568 720,42	16,98	38,21
30.	KOTA MAGELANG	3 173 926,23	3 486 624,47	4 776 857,71	9,85	37,01
31.	KOTA SURAKARTA	2 988 455,52	3 205 834,43	4 106 934,08	7,27	28,11
32.	KOTA SALATIGA	2 094 146,32	2 311 951,19	3 355 474,21	10,40	45,14
33.	KOTA SEMARANG	5 139 320,99	5 950 908,99	7 482 921,00	15,79	25,74
34.	KOTA PEKALONGAN	2 198 927,25	2 469 586,53	3 742 648,24	12,31	51,55
35.	KOTA TEGAL	1 788 563,52	2 046 869,38	2 715 633,75	14,44	32,67
PROPINSI JATENG		1 758 443,37	1 996 861,36	2 758 485,07	13,56	38,14

TABEL M.2.
PDRB PER KAPITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TANPA MIGAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1996 SAMPAI DENGAN 1998 (Rupiah)

No.	Daerah Kabupaten/kota	1996	1997	1998	Perubahan (%)	
					96-97	97-98
1.	KAB CILACAP	1 636 164,82	1 822 851,78	4 099 124,87	11,41	124,87
2.	KAB BANYUMAS	886 729,69	1 020 212,09	1 483 921,55	15,05	45,45
3.	KAB PURBALINGGA	993 424,61	1 136 902,20	1 540 905,90	14,44	35,54
4.	KAB BANJARNEGARA	1 234 748,41	1 387 700,32	2 063 953,30	12,39	48,73
5.	KAB KEBUMEN	1 029 536,84	1 113 422,96	1 487 440,11	8,15	33,59
6.	KAB PURWOREJO	1 148 692,96	1 426 812,62	1 983 472,34	24,21	39,01
7.	KAB WONOSOBO	918 140,78	968 066,99	1 300 723,86	5,44	34,36
8.	KAB MAGELANG	1 201 951,01	1 336 539,03	1 784 550,66	11,20	33,52
9.	KAB BOYOLALI	1 328 321,72	1 486 764,26	2 218 343,49	11,93	49,21
10.	KAB KLATEN	1 216 527,11	1 386 053,24	1 950 637,52	13,94	40,73
11.	KAB SUKOHARJO	1 865 697,44	2 138 613,06	2 702 393,67	14,63	26,36
12.	KAB WONOGIRI	913 207,85	997 075,39	1 468 713,45	9,18	47,30
13.	KAB KARANGANYAR	1 855 609,85	2 030 716,87	2 817 239,01	9,44	38,73
14.	KAB SRAGEN	1 063 035,87	1 160 014,03	1 766 139,95	9,12	52,25
15.	KAB GROBOGAN	765 776,29	805 162,56	1 078 441,28	5,14	33,94
16.	KAB BLORA	780 147,87	947 627,08	1 247 469,85	21,47	31,64
17.	KAB REMBANG	1 170 738,33	1 319 756,64	1 958 314,43	12,73	48,38
18.	KAB PATI	1 114 408,32	1 245 883,90	1 808 826,07	11,80	45,18
19.	KAB KUDUS	6 701 800,46	7 006 136,53	9 974 740,29	4,54	42,37
20.	KAB JEPARA	1 386 460,57	1 557 888,85	2 328 564,59	12,36	49,47
21.	KAB DEMAK	1 059 458,56	1 189 720,03	1 647 518,95	12,30	38,48
22.	KAB SEMARANG	1 869 246,21	2 081 763,59	2 767 507,00	11,37	32,94
23.	KAB TEMANGGUNG	1 368 319,67	1 486 953,55	2 043 498,26	8,67	37,43
24.	KAB KENDAL	2 340 817,75	2 749 054,91	3 623 214,18	17,44	31,80
25.	KAB BATANG	1 532 512,06	1 688 037,63	2 342 924,94	10,15	38,80
26.	KAB PEKALONGAN	1 418 939,09	1 662 763,01	2 329 280,28	17,18	40,08
27.	KAB PEMALANG	1 013 465,45	1 125 056,11	1 477 131,51	11,01	31,29
28.	KAB TEGAL	868 119,33	976 771,40	1 377 338,71	12,52	41,01
29.	KAB BREBES	970 271,35	1 134 992,41	1 568 720,42	16,98	38,21
30.	KOTA MAGELANG	3 173 926,23	3 486 624,47	4 776 857,71	9,85	37,01
31.	KOTA SURAKARTA	2 988 455,52	3 205 834,43	4 106 934,08	7,27	28,11
32.	KOTA SALATIGA	2 094 146,32	2 311 951,19	3 355 474,21	10,40	45,14
33.	KOTA SEMARANG	5 139 320,99	5 950 908,99	7 482 921,00	15,79	25,74
34.	KOTA PEKALONGAN	2 198 927,25	2 469 586,53	3 742 648,24	12,31	51,55
35.	KOTA TEGAL	1 788 563,52	2 046 869,38	2 715 633,75	14,44	32,67
PROPINSI JATENG		1 689 331,66	1 915 901,49	2 623 111,56	13,41	36,91

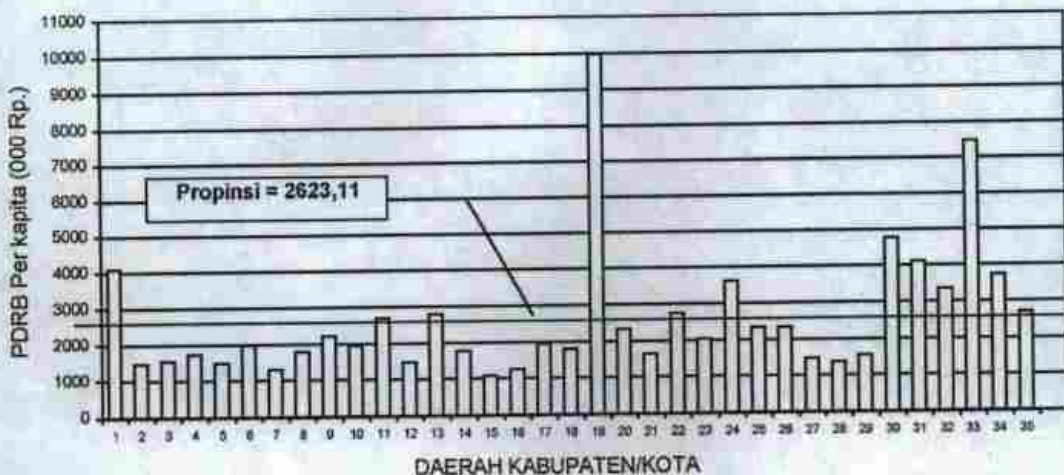
Grafik 9. PDRB Per Kapita Dati II Dengan Migas Tahun 1998



2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB & PDRB Per Kapita Daerah Kabupaten/kota Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB & PDRB Per Kapita Propinsi Jawa Tengah

Untuk melihat lebih jauh lagi disajikan data perbandingan antar laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita per Daerah Kabupaten/Kota dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Propinsi Jawa Tengah,

Grafik 10. PDRB Per Kapita Dati II Tanpa Migas Tahun 1998



disajikan dalam bentuk analisis plot (scatter diagram) yang bisa menggambarkan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita antar daerah dan propinsi.

Pada plot tersebut, sumbu horisontal menunjukkan PDRB per kapita, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi. Plot yang disajikan ini keadaan tahun 1998 yang bertujuan untuk memberikan gambaran PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 dengan tahun dasar 1993. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi propinsi, disajikan sebagai angka rata-rata, demikian pula pada sumbu horisontal adalah PDRB per kapita Jawa Tengah yang merupakan angka rata-rata. Maka titik-titik yang terletak di koordinat pada plot tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kuadran. Kuadran I adalah kuadran yang menggambarkan keadaan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Propinsi Jawa Tengah.

Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kuadran I (dengan migas) pada tahun 1998 terdapat 8 Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan bila ditinjau dari segi perhitungan PDRB tanpa migas terdapat 10 Daerah Kabupaten/Kota.

Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan keadaan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di bawah angka Propinsi Jawa Tengah dan PDRB per kapitanya lebih tinggi daripada angka Propinsi Jawa Tengah.

Kelompok Daerah Kabupaten/Kota yang menempati kuadran II pada tahun 1998 (dengan migas) terdapat 3 Daerah Kabupaten/Kota. Untuk perhitungan PDRB tanpa migas pada tahun 1998 terdapat 2 Daerah Kabupaten/Kota.

Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan keadaan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di bawah angka Propinsi Jawa Tengah.

Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan keadaan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas angka Propinsi Jawa Tengah dan PDRB per kapitanya di bawah angka Propinsi Jawa Tengah.

Kuadran III pada tahun 1998 (dengan migas) terdapat 1 Daerah Kabupaten/Kota. Apabila perhitungan PDRB migas dikeluarkan maka kuadran III tahun 1998 tidak ada Kab./kota yang menempati kuadran tersebut.

Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan keadaan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas angka Propinsi Jawa Tengah dan PDRB per kapitanya di bawah angka Propinsi Jawa Tengah.

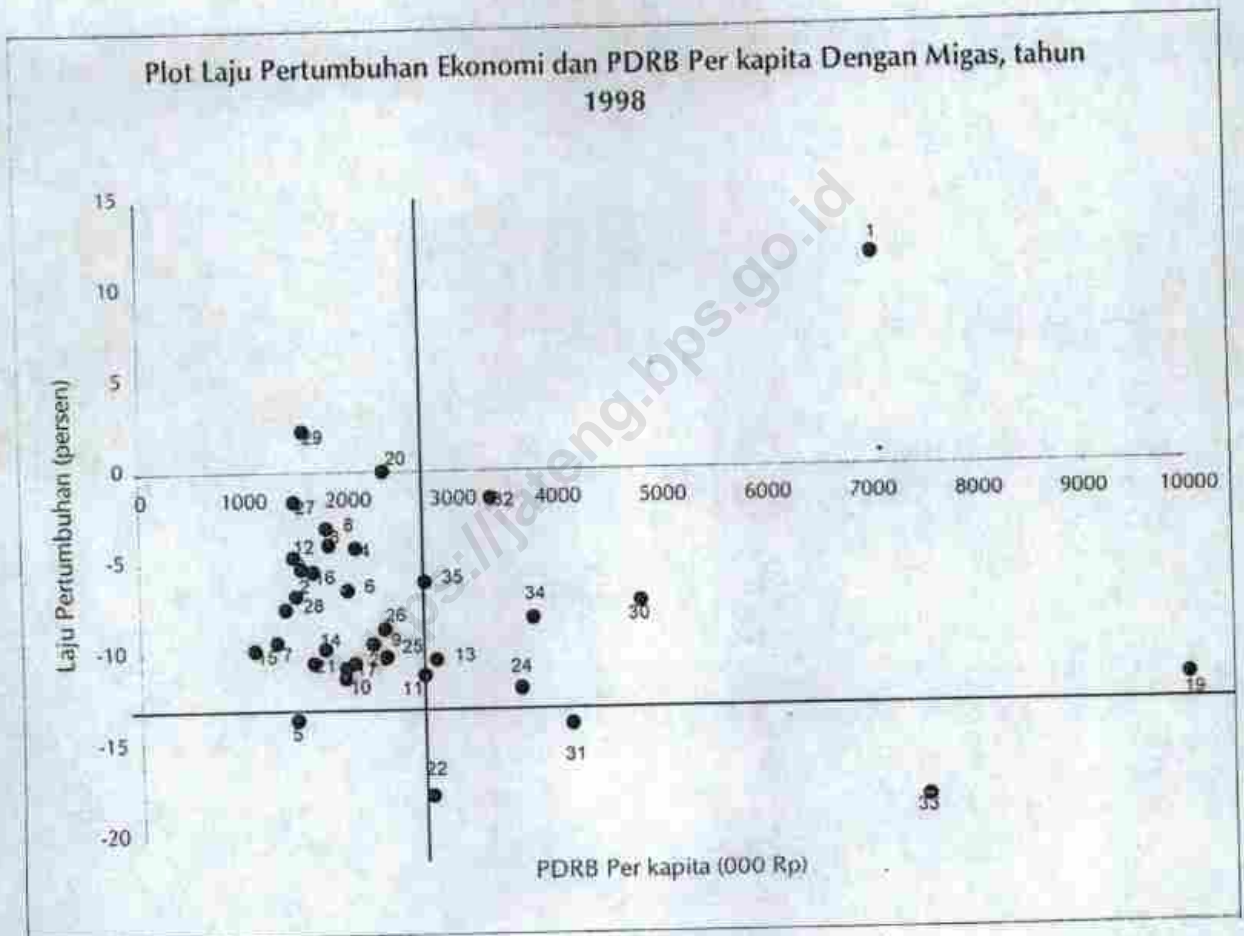
Keadaan tahun 1998 (dengan migas) terdapat 23 Daerah Kabupaten/Kota. Apabila perhitungan PDRB migas tidak dimasukkan terdapat 25 Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya upaya setiap Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maupun

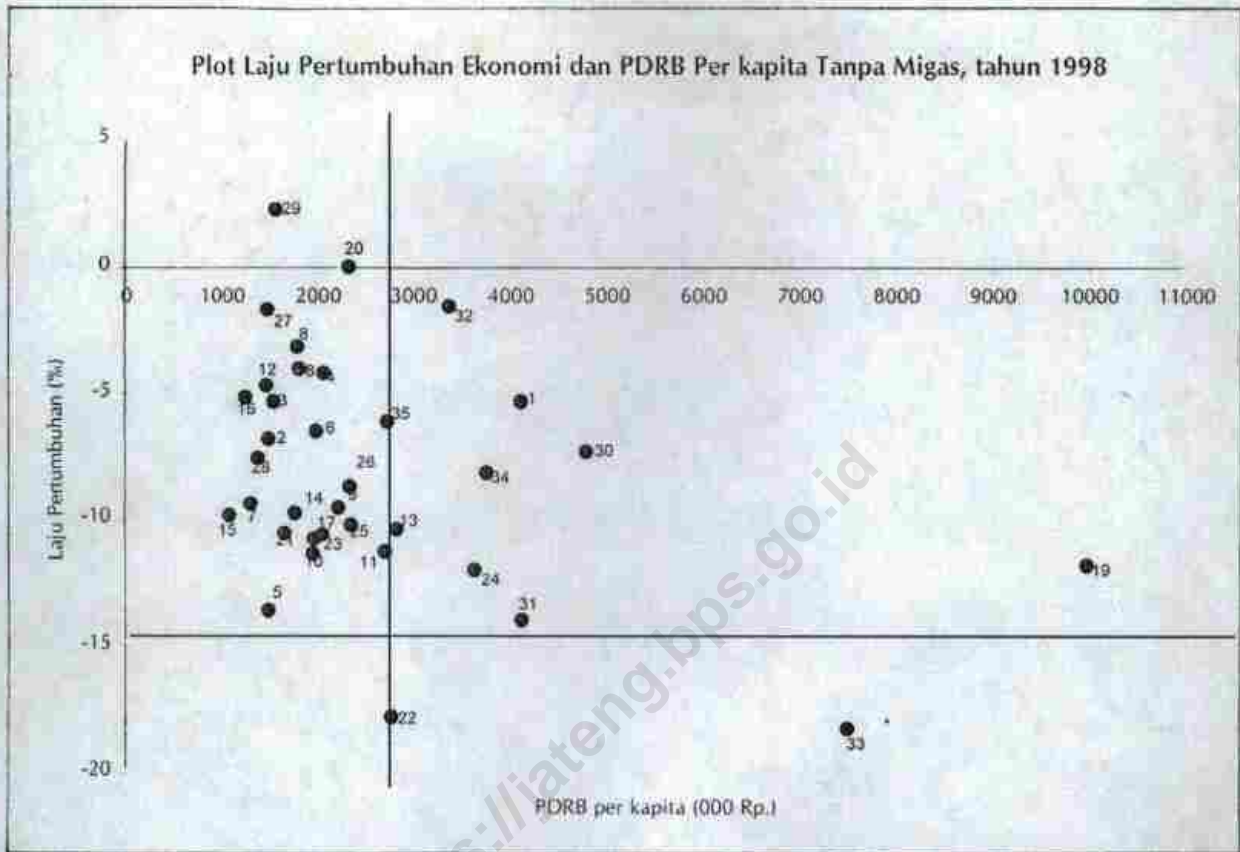
dalam meningkatkan PDRB per kapitanya mengakibatkan posisi tiap Daerah Kabupaten/Kota dapat selalu berubah dari tahun ke tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam posisi kuadran pada umumnya disebabkan oleh dua faktor

yaitu :

- Nilai PDRB, yang merupakan jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh sektor ekonomi
- Jumlah penduduk dari Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Plot Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per kapita Tanpa Migas, tahun 1998



Publikasi ini menyajikan gambaran tentang perkembangan perekonomian daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Cakupan publikasi tersebut meliputi :

- ◆ PDRB antar Kabupaten/Kota
- ◆ Struktur Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota
- ◆ Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota
- ◆ PDRB per kapita Kabupaten/Kota

Tinjauan Ekonomi Regional Jawa Tengah 1996 - 1998 disiapkan oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Propinsi Jawa Tengah. Informasi lebih lanjut Telp. 412804 pesawat 306/308

BPS

Badan Pusat Statistik
Propinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang Telp. (024) 412802 - 412805 Telex : 22370 kpsmg ra

No Buku : 3

Katalog : 9